

Implementasi Fungsi Audit Internal Dalam Penerapan Prinsip Akuntabilitas (Studi Perumda Pasar Juara Kota Bandung)

Sina Delphia Sukmana¹, Yuniati², Hendriyana³

^{1, 2, 3}Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, 40614, Indonesia,

delphasina12@gmail.com¹, yuniati@umbandung.ac.id², hendriyana@umbandung.ac.id³,

Info Artikel:

Diterima:

Disetujui:

Dipublikasikan:

Kata Kunci:

Audit Internal, *Good Corporate Governance*, Akuntabilitas

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui fungsi audit internal, pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), serta pentingnya prinsip akuntabilitas terlaksana di dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi dokumen, dan triangulasi. Penelitian ini berlokasi di Perumda Pasar Juara kota Bandung. Hasil akhir pada penelitian ini berupa temuan bahwa fungsi audit internal di dalam perusahaan sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan memainkan peran yang sangat penting sebagai *preventive control*, *detective control*, dan *corrective control*. Namun pada faktanya GCG belum diterapkan di dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung. Berdasarkan hasil temuan yang ada, pelaksanaan GCG sangat penting untuk dilakukan di dalam perusahaan. Penelitian juga menunjukkan bahwa pada prinsip akuntabilitas yang terlaksana masih memiliki banyak ketidaksesuaian dengan kriteria yang ada.

PENDAHULUAN

Pasar tradisional di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan yang sebenarnya masih berkaitan dengan permasalahan yang sama. Pasar tradisional lebih cenderung dipersepsikan sebagai tempat yang kotor, semrawut, becek, pengap, bau dan pengap. Situasi ini yang membuat aktivitas belanja di pasar tradisional mengalami penurunan. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam pengembangan dan sistem pengelolaan sangat penting agar citra buruk atau negatif pasar tradisional di Indonesia dapat ditekan bahkan dihilangkan (Yandri, 2020). Keberadaan pasar tradisional sendiri saat ini dinilai sedang mengalami kemunduran dan kelemahan (Luh et al., 2021). Keberadaannya pada saat ini beresiko terancam oleh perkembangan pasar dan bisnis modern yang sedang berkembang secara pesat karena di musim seperti ini, berbagai ritel modern seperti supermarket dan minimarket bermunculan bak jamur dimana-mana (Ariyani, 2019). Berdasarkan kondisi yang ada, perlu kiranya pasar tradisional melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan melalui audit internal.

Audit internal sebagai elemen dari sistem pengendalian internal di perusahaan merupakan suatu alat kontrol yang bisa dibidang sangat penting untuk menjalankan fungsi dari suatu struktur organisasi atau perusahaan itu sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Ratri & Bernawati, 2020). Menurut (Hery, 2017:238) dalam (Felix et al., 2022) juga mengungkapkan bahwa audit internal merupakan bagian dari fungsi evaluasi yang dikembangkan dengan bebas dalam suatu organisasi atau perusahaan serta bersifat independen untuk menguji dan menilai suatu aktivitas dalam bidang akuntansi, bidang keuangan, dan bidang operasional lainnya yang menjadi dasar layanan kepada manajemen sebagai layanan kepada organisasi bisnis. Audit Internal juga dikenal sebagai pemberian keyakinan serta konsultasi yang *independent* dan obyektif dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Pendekatan yang

sistematis digunakan dalam evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. (The Professional Practices Framework, 2004) dalam (Nugroho & Bayunitri, 2021).

Fungsi audit internal menurut Romney (2014:227) dalam (Azizah & Ariyani, 2023) berfungsi sebagai pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Lebih lanjut, menurut (Christianto et al., 2019) audit internal berfungsi untuk melakukan penilaian terhadap keefektifan di dalam suatu perusahaan. Fungsi audit internal tersebut dapat terlaksana dengan dibantu oleh seorang auditor internal yang *independent* dengan berfokus pada validasi pengendalian dan mempunyai dampak positif ketika melakukan penugasan konsultasi (Nisak & Rochayatun, 2019). Fungsi audit internal juga dapat ditingkatkan jika auditor internal diizinkan oleh manajemen untuk mengambil peran sebagai penasihat mengenai teknik manajemen risiko dan kemudian terlibat dalam inisiatif utama tata kelola perusahaan yang strategis, tata kelola perusahaan yang baik tersebut juga dapat ditandai dengan terdapatnya budaya pengendalian internal yang kuat di dalam perusahaan (Zunaedi et al., 2022).

Peran auditor internal yang *independent* sangat penting dalam penerapan GCG di dalam perusahaan sehingga dapat meminimalkan dan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul yang dapat menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak (Hutabarat & Tobing, 2022). Secara teoritis, praktik GCG juga dinilai dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi tingkat risiko suatu entitas, sekaligus meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. (Bali Sakhya Prawira & Rasmini, 2020).

Audit internal juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan GCG yang menurut Endiana (2009) dalam (Alfian, 2020) *Good Corporate Governance* (GCG) dapat didefinisikan dapat dijelaskan sebagai sistem dan struktur yang efisien dalam mengelola sebuah perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai saham dan memenuhi kepentingan berbagai pihak yang terlibat dengan perusahaan, termasuk kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan publik atau masyarakat umum. Dengan semakin mendesaknya penerapan GCG atau tata kelola perusahaan yang baik untuk memenuhi kebutuhan zaman khususnya di bidang perekonomian, maka para pelaku ekonomi di Indonesia harus mampu bersaing secara global, dan para pelaku ekonomi semakin menuntut untuk memerlukan pemikiran kritis dalam menyikapi situasi yang sulit serta persaingan yang menjadi semakin ketat mengenai isu-isu baru di dalam bidang perekonomian (Amdanata et al., 2019) (Hanim, 2018).

Sejalan dengan isu-isu permasalahan mengenai pengendalian internal serta akuntabilitas perusahaan, entitas perusahaan diharuskan untuk bertanggung jawab dalam kegiatan organisasinya. Prinsip akuntabilitas tersebut harus diterapkan dan terus dikembangkan dalam kegiatan bisnis sejalan dengan standar akuntabilitas yang semakin meningkat di seluruh dunia karena prinsip akuntabilitas juga memainkan peran penting dalam mempertahankan aktivitas perekonomian itu sendiri (Mais Dan & Palindri, 2020).

Menurut Sholeh (2015), sebagaimana dikutip oleh (Anggriani et al., 2019), akuntabilitas merupakan prinsip dan asas yang mengatur pertanggungjawaban kinerja agar sesuai dengan peraturan yang ada serta perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat. Lebih lanjut, Sholeh (2015) dalam penelitian yang sama menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan pihak atau otoritas yang memiliki wewenang lebih tinggi untuk memberikan penjelasan kepada publik atau masyarakat umum mengenai hal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Prinsip akuntabilitas sendiri memiliki berbagai fungsi yang sangat penting di dalam perusahaan, menurut (Khaula Senastri, 2022) prinsip akuntabilitas berfungsi sebagai alat kontrol demokrasi, alat pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Sedangkan, menurut (Kiri & Handayani, 2021) prinsip akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya kepada berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Zulkarnaen, Sasangka, et al., 2020).

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah proses di dalam penelitian beserta dengan pemahaman yang didasarkan pada metode untuk menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia, sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2019). Menurut Walidin, dkk (2015), seperti yang dikutip oleh (Fadli, 2021) bahwa penelitian kualitatif adalah suatu tahapan atau proses penelitian yang tujuannya adalah untuk mendalami fenomena manusia atau sosial dengan membuat gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang kemudian dapat dijelaskan melalui kata-kata. Penelitian ini melibatkan pelaporan pandangan yang terperinci yang diperoleh dari sumber informan dan dilakukan dalam konteks yang alami. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, di mana penelitian dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan penerapan model kualitatif. Istilah penelitian kualitatif juga merujuk pada jenis penelitian yang tidak menghasilkan temuan melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan hasil penelitian yang mendetail secara deskriptif, didasarkan pada kata-kata tertulis atau bisa disebut juga lisan dari suatu individu serta perilaku yang diamati.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi. Proses pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui uji validitas, yang mencakup uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas atau objektivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumda Pasar Juara Kota Bandung membentuk aparat pengawas internal perusahaan yaitu Bidang Satuan Pengawas Internal (SPI). Satuan Pengawas Internal (SPI) tersebut dinaungi oleh seorang kepala bagian yang memiliki tanggung jawab secara penuh kepada Direktur Utama. Penunjukan kepala SPI dilaksanakan setelah memperoleh beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas di dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Satuan Pengawas Internal juga membuat program kerja secara tertulis yang wajib untuk dilaporkan kepada direktur utama. SPI juga memberikan laporan kepada Direktur Utama atas hasil dari pelaksanaan tugas serta tanggung jawab mereka dengan tembusan yang dikirimkan juga kepada Dewan Pengawas yang ada di dalam perusahaan. SPI juga dapat memberikan keterangan atau penjelasan secara langsung kepada Dewan Pengawas mengenai laporan yang telah mereka buat.

Kemudian, hasil pemeriksaan dari unit pengawas internal tersebut disampaikan oleh direktur utama kepada seluruh anggota direksi. Informasi ini kemudian dijadikan pokok pembahasan dalam rapat direksi selanjutnya. Direksi memiliki kewajiban untuk memerhatikan serta segera mengambil tindakan yang dibutuhkan terhadap semua hal yang diungkapkan dalam setiap laporan dari hasil pemeriksaan yang disusun oleh unit pengawas internal. Dalam menjalankan tugasnya, unit pengawas internal juga harus memastikan kelancaran pekerjaan unit organisasi lain di Perumda Pasar Juara Kota Bandung, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab setiap individual (Zulkarnaen, Erfiansyah, et al., 2020)(Ikram et al., 2020)(Hanim, 2020a) (Hanim et al., 2019)(Sugiartiningsih & Hanim, 2019b) (Sugiartiningsih & Hanim, 2019a).

Umumnya, untuk menilai sejauh mana kelancaran operasional perusahaan dan efektivitas pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh perusahaan, posisi auditor internal diperlukan sebagai bagian dari instrumen dalam mencapai tujuan perusahaan. Kehadiran audit internal menjadi penting karena perusahaan semakin berkembang dan belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, pelaksanaan audit internal pada Perumda Pasar Juara Kota Bandung tersebut dilakukan agar manajemen dapat mengambil suatu tindakan tertentu atas hasil

dari audit internal tersebut (Hanim & Apriliana, 2020)(Sukmawati & Hanim, 2020)(Hanim, 2020b)(Bowen, 2013)(Ali et al., 2018)(Sugiartiningsih et al., 2019)(Sugiartiningsih & Saudi, 2019)(. et al., 2018)(Lisnawati et al., 2024).

Dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung, kegiatan audit internal dilaksanakan oleh Bidang SPI yang bekerja secara *independent* dan tidak memiliki kepentingan langsung dalam operasi perusahaan. Satuan Pengawas Internal di Perumda Pasar Juara Kota Bandung dibantu oleh seorang auditor internal yang wajib memiliki keahlian beserta pengalaman yang memadai dalam bidang audit internal, sehingga mampu untuk memberikan rekomendasi yang tepat, efektif, dan efisien kepada manajemen(Yudawisastra et al., 2018)(Karsam et al., 2022)(Asmeri et al., 2023).

Fungsi audit internal dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung yaitu untuk memverifikasi bahwa sistem pengendalian internal di perusahaan beroperasi secara efektif dan efisien. Audit internal juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas operasi, serta membantu mengidentifikasi risiko dan meminimalkan dampaknya. Secara lebih lanjut, fungsi audit internal dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung dapat berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, meningkatkan efisiensi operasional, mengelola risiko, menilai kualitas dan integritas informasi keuangan, meningkatkan pengelolaan asset, meningkatkan tata kelola perusahaan, serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas(Asmeri et al., 2023)(Hanim et al., 2023)(Hanim et al., 2023).

Hal ini juga konsisten dengan hasil teori yang dikemukakan oleh Romney (2014:227) dalam (Azizah & Ariyani, 2023) yang sudah dilakukan uji validitas isi bersama *expert judgement*, bahwa audit internal dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung sudah berfungsi sebagai pengendalian preventif (*preventive control*), Pengendalian detektif (*detective control*), serta pengendalian korektif (*corrective control*) (Quddus et al., 2020).

Good Corporate Governance (GCG) adalah sebuah kerangka kerja yang mengatur cara perusahaan dijalankan dan dikendalikan secara efektif dan etis. *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk menciptakan lingkungan atau suasana di dalam perusahaan yang sehat dan berintegritas bagi manajemen, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks Perumda Pasar Juara Kota Bandung, penerapan GCG menjadi cukup krusial untuk memastikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung, yang mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan (GCG) yang baik dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan (GCG) yang baik. Prinsip GCG yang baik sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, terdiri atas lima prinsip yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara beserta hasil *expert judgement* dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan GCG sangatlah penting dalam membangun lingkungan bisnis yang sehat, transparan, dan akuntabel. *Good Corporate Governance* (GCG) dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengelola risiko dengan efektif. Selain itu, *Good Corporate Governance* (GCG) juga membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan lingkungan etika yang baik, serta memperkuat kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan melakukan pelaksanaan GCG yang baik, Perumda Pasar Juara dapat meraih tujuan perusahaan secara berkelanjutan sembari memberikan manfaat kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Prinsip akuntabilitas merupakan komponen dari prinsip GCG yang menggambarkan kewajiban organisasi atau individu untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil dari operasional atau kegiatan yang mereka lakukan. Setelah penulis melakukan observasi pada Perumda Pasar Juara Kota Bandung, prinsip akuntabilitas yang seharusnya dilaksanakan di dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung masih belum sesuai dengan beberapa kriteria yang ada.

Lebih lanjut lagi, temuan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas di dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung yang didapatkan melalui metode observasi, wawancara kepada beberapa karyawan di Perumda Pasar Juara Kota Bandung, serta triangulasi maka dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Temuan Prinsip Akuntabilitas di dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung

No.	Kriteria Prinsip Akuntabilitas	Temuan/ Kondisi	Rekomendasi
1.	Jelasnya Struktur <i>Corporate Governance</i>	Belum Sesuai	Struktur <i>corporate governance</i> yang ada harus dilakukan secara eksplisit, mencakup peran dan tanggung jawab dewan direksi, komite, dan pihak-pihak terkait lainnya. Struktur ini perlu mematuhi regulasi yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan serta skala perusahaan.
2.	Pemisahan Peran dan Kendali	Belum Sesuai	Pemisahan peran dan kendali ini menjaga agar tidak ada konsentrasi terlalu besar kekuasaan pada satu individu atau kelompok.
3.	Tanggung Jawab atas Kinerja	Sesuai	Seluruh manajemen dan dewan direksi wajib bertanggung jawab secara penuh atas kinerja Perumda Pasar Juara Kota Bandung. Mereka harus berkomitmen untuk mencapai tujuan perusahaan dengan menggunakan cara yang etis serta sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
4.	Pemantauan dan Evaluasi	Sesuai	Wajib terdapat mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja perusahaan dan anggota dewan direksi. Misalnya dengan melakukan audit internal dan eksternal secara teratur.
5.	Kebijakan dan Standar Etika yang Jelas	Belum Sesuai	Harus ditetapkan kebijakan dan standar etika yang jelas dan tegas. Pastikan bahwa seluruh karyawan dan manajemen memahami dan mematuhi etika ini dalam setiap aspek bisnis yang dilakukan.
6.	Keterbukaan dalam komunikasi	Belum Sesuai	Perumda Pasar Juara Kota Bandung harus terbuka dalam menerima masukan serta umpan balik dari pemangku kepentingan dan meresponsnya dengan tepat waktu. Transparansi dalam komunikasi akan membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan.
7.	Memiliki sistem penghargaan dan sanksi bagi karyawan	Belum Sesuai	Perumda Pasar Juara Kota Bandung dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas seharusnya dapat membuat system penghargaan dan sanksi bagi karyawan yang bekerja di Perumda Pasar Juara Kota Bandung. Misalnya, dapat diberikan penghargaan kepada karyawan yang bertanggung

No.	Kriteria Prinsip Akuntabilitas	Temuan/ Kondisi	Rekomendasi
			jawab dan berkinerja baik, sementara dapat diberikan sanksi bagi mereka yang melanggar prinsip akuntabilitas dan etika bisnis.

Dari sebanyak tujuh kriteria yang peneliti dapatkan melalui teori yang membahas prinsip akuntabilitas beserta hasil konsultasi bersama expert judgement tersebut, maka dapat disimpulkan melalui hasil observasi dan wawancara bersama responden dalam penelitian ini bahwa hanya terdapat dua kriteria saja yang sesuai pada temuan di dalam penelitian ini yaitu tanggung jawab terhadap kinerja karyawan serta pemantauan dan evaluasi karyawan. Sedangkan, kriteria mengenai kejelasan struktur tata kelola perusahaan, pemisahan peran dan kendali di dalam perusahaan, kebijakan dan standar etika yang jelas bagi karyawan, keterbukaan dalam komunikasi antar karyawan, serta terdapatnya sistem penghargaan dan sanksi bagi karyawan masih belum diterapkan di dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung (Alfiana et al., 2017).

Kedua kriteria yang telah terlaksana tersebut telah dilakukan oleh seluruh karyawan untuk bertanggung jawab terhadap kinerjanya secara individual sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang dimiliki oleh setiap bidangnya. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi karyawan telah dilakukan tugasnya oleh bidang Satuan Pengawas Internal (SPI) di dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung, terbukti dengan telah terlaksananya audit internal. Namun kelima kriteria lainnya belum terlaksana di dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung yang menyebabkan prinsip akuntabilitas belum dapat diterapkan secara keseluruhan dengan baik dan benar di dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung (Bangkara et al., 2021).

Maka dari itu berdasarkan hasil temuan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas di dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung tersebut, dapat dilihat bahwa prinsip akuntabilitas ini sangatlah penting untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan integritas dalam menjalankan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Terlebih lagi dengan fenomena permasalahan yang penulis temukan di dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung, prinsip akuntabilitas yang dilaksanakan dengan baik dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang ada (Hanim, 2021).

Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam Perumda Pasar Juara Kota Bandung merupakan hal yang esensial untuk membentuk suasana perusahaan yang berintegritas, transparan, dan efisien. Prinsip akuntabilitas membantu meningkatkan transparansi, kepercayaan masyarakat, mendorong pertanggungjawaban, dan meningkatkan pengelolaan risiko. Selain itu, prinsip akuntabilitas juga membantu menghindari praktik korupsi dan penyimpangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan laporan keuangan yang akurat.

Hasil *expert judgement* juga mengungkapkan bahwa melalui penerapan prinsip akuntabilitas ini, perusahaan dapat mencapai tujuannya secara berlanjut dan memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat. dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka juga mengungkapkan bahwa pentingnya prinsip akuntabilitas ini tidak dapat dipandang sebelah mata, karena merupakan fondasi yang kuat bagi kesuksesan dan integritas perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif dan kompleks.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa fungsi audit internal itu sendiri memainkan peran sebagai alat kontrol yang sangat penting dalam memastikan operasi yang efisien, transparansi dan akuntabilitas (*Preventive Control*). Kemudian, dengan melakukan penilaian independen terhadap berbagai aspek bisnis, audit internal juga berfungsi untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, efisiensi operasional, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan (*Detective Control*). Hasil audit internal juga memberikan informasi yang berharga bagi manajemen perusahaan untuk mengambil langkah korektif yang sesuai untuk keberlanjutan dan keberhasilan perusahaan pada masa depan (*Corrective Control*). Prinsip GCG juga sangat penting untuk dilaksanakan di dalam perusahaan tersebut, karena bertujuan

untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengelola risiko dengan efektif, menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Lebih lanjut lagi, temuan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas di dalam perusahaan menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas masih belum diterapkan dengan sesuai. Dari sebanyak tujuh kriteria yang ada mengenai prinsip akuntabilitas, hanya terdapat dua kriteria saja yang sesuai pada temuan di dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- . S., Juny, H., Oki, I., Apriliana, T., & Ali, M. (2018). Influence of Tax, Unemployment and Political Instability to Indonesia Government Expenditures 1988-2016 Period. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(4.34), 235. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.34.23897>
- Alfian, N. (2020). Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 5(2), 209–218. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v5i2.2057>
- Alfiana, Sule, E. T., Sutisna, & Masyita, D. (2017). Contagion and systemic risks: The case of Indonesian banking. *International Journal of Business and Globalisation*, 19(3), 396–413. <https://doi.org/10.1504/IJBG.2017.087223>
- Ali, M., Andari, D., Indah Bayunitri, B., Ariffian, A., & . S. (2018). Analysis of Financial Performance based on Liquidity and Profitability Ratio (Case Study on PT Unilever in period 2013-2017). *International Journal of Engineering & Technology*, 7(4.34), 214. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.34.23892>
- Amdanata, D. D., Yusriadi, Y., Mansor, N., & Lestari, N. N. (2019). Implementasi Asas Transparansi Good Corporate Governance pada BUMD di Indonesia. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 154. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1172>
- Anggriani, N., Sukabumi, M., Nurodin, I., Sukabumi, M., Iskandar, D., Sukabumi, M., & Desa, B. (2019). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. 13(2), 134–145.
- Ariyani, N. (2019). Penataan Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia Berdasarkan Teori “Von Stufennaufbau De Rechtsordnung.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2), 204. <https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2667>
- Asmeri, R., Ardiany, Y., Sari, R., Suarsa, A., & Sari, L. (2023). Disclosure of Carbon Emissions: Media Exposure, Industry Type, and Profitability of Food and Beverage Companies. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 16(1), 98–106. <https://doi.org/10.23969/jrbm.v16i1.7398>
- Azizah, A., & Ariyani, E. D. (2023). *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science*. Atlantis Press.
- Bali Sakhya Prawira, I. G. N. G., & Rasmini, N. K. (2020). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Budaya Tri Hita Karana pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2366. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p15>
- Bangkara, B. M. A. S. A., Rachmawati, I., Liantoni, F., Hidayatulloh, A. N., & Suarsa, A. (2021). Optimizing health leadership in early prevention efforts in village communities: Review of public health database. *International Journal of Health Sciences*, 5(3), 352–363. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v5n3.1576>
- Bowen, H. R. (2013). *Social Responsibilities of the Businessman*. University of Iowa Press. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ALIPAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=Social+Responsibilities+>

of+the+Businessman&ots=db2eQjvnxn&sig=jNvKKyG_WiVT_PHE-

agMDZYNNaM&redir_esc=y#v=onepage&q=Social Responsibilities of the Businessman&f=false

- Christianto, E., Soeherman, B., & Fakultas, A. (2019). *PERAN AUDITOR INTERNAL SEBAGAI WATCHDOG , CONSULTANT , ATAU CATALYST ? STUDI KASUS DI UNIVERSITAS SURABAYA*. 7(2), 677–692.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Felix, H. M., Bagus, I., & Bayangkara, K. (2022). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mengawal Tata Kelola Perusahaan (Studi Kasus pada PT . Perkebunan Nusantara XI)*. 7(2), 522–532.
- Hanim, W. (2018). the Implementation of Drinking Water Supply System in Decentralization Era. *Trikonomika*, 17(2), 59.
<https://doi.org/10.23969/trikononika.v17i2.1434>
- Hanim, W. (2020a). *ANALYSIS OF AGRICULTURE , INDUSTRY AND SERVICE INEQUALITY*. 24(2), 8679–8691.
- Hanim, W. (2020b). *The Determinant Factors of Foreign Direct Investment (FDI) on Indonesian Economy Please cite as follows : Hanim , W . (2020) , The Determinant Factors of Foreign Direct Investment (FDI) on Indonesian Economy , International Journal of Psychosocial Author ' s email : Wasifah.hanim@umbandung.ac.id. January.*
- Hanim, W. (2021). How Does Foreign Direct Investment (FDI) Reduce Poverty? Application of the Triangular Hypothesis for the Indonesian Case. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10(1), 400.
- Hanim, W., & Apriliana, T. (2020). How Important Gender Inequality in Education on Poverty Reduction? Indonesian Case. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(02), 3288–3292.
<https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i2/pr200639>
- Hanim, W., Prasca, H. A., Pertiwi, W. N., Yudawisatra, H. G., & Sugiartiningsih, S. (2023). Determination Analysis of Leading Commodity in the Melonguane National Border Strategic Area (NBSA). *Jurnal Economia*, 19(1), 55–67.
<https://doi.org/10.21831/economia.v19i1.51388>
- Hanim, W., Sugiartiningsih, & Qamri, G. M. (2019). Are basic infrastructures have good impact on poverty reduction? An Indonesian panel data analysis. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(3 Special Issue), 566–573.
- Hutabarat, R., & Tobing, S. F. (2022). Peran Audit Internal Dan Komite Audit Dalam Pencapaian Tujuan Good Corporate Governance Pada Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*, 3(2), 14–29.
<https://doi.org/10.52333/ratri.v3i2.892>
- Ikram, S., Hanim, W., & -, S. (2020). Effects of Growth & Learning and Internal Business Processes on Financial Performance (Survey of Regional Water Company (PDAM) in Java). *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(02), 3255–3262. <https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i2/pr200635>
- Karsam, K., Erfiansyah, E., Pratiwi, I. R., Hendriyana, H., & Kodariah, S. (2022). “Mutual Assistance” Culture to Maintain Corporate Sustainability. *Journal of Accounting and Investment*, 23(3), 446–459.
<https://doi.org/10.18196/jai.v23i3.13859>
- Khaula Senastri. (2022). *Mengenal Akuntabilitas Publik dan Berbagai Manfaatnya*. Accurate.
- Kiri, S. H. P., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Publik Serta Fungsi Pemeriksaan Inten Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(8).
- Lisnawati, L., Aryati, T., & Gunawan, J. (2024). Implementation of Digital Innovation on Sustainability Performance: the Moderating Role of Green Accounting in the Industrial Sector. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 1(13(127)), 59–68. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.298639>
- Luh, N., Mahendrawati, M., Suryani, L. P., Hukum, F., Warmadewa, U., & Pasar, K. (2021). *Jurnal Interpretasi Hukum*. 2(2), 429–434.

- Mais Dan, R., & Palindri, L. (2020). PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM MENGELOLA KEUANGAN DESA. In *Jurnal Akuntansi dan Governance* (Vol. 1, Issue 1).
- Nisak, I. A., & Rochayatun, S. (2019). *THE ROLE OF INTERNAL AUDIT, FRAUD DETECTION, AND PREVENTION IN UNIVERSITIES: A LITERATURE REVIEW*. 8(August), 63–71.
- Nugroho, W., & Bayunitri, B. I. (2021). Pengaruh Audit Internal Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada PT Pos Indonesia (Persero)). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1901–1918.
<https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.633>
- Quddus, A., Nugroho, B. S., Hakim, L., Ritaudin, M. S., Nurhasanah, E., Suarsa, A., Karyanto, U. B., Tanjung, R., Hendar, Pratama, V. Y., Awali, H., Mufid, A., Purwanto, A., Fahlevi, M., & Sudargini, Y. (2020). Effect of ecological, servant dan digital leadership style influence university performance? evidence from indonesian universities. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(10). <https://doi.org/10.31838/srp.2020.10.64>
- Ratri, M. C., & Bernawati, Y. (2020). Penerapan Standar Profesional Audit Internal Dan Kualitas Audit: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(1), 47–56. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i1.605>
- Sugiatiningsih, & Hanim, W. (2019a). Realization of expansive monetary policy in pressing inflation in Indonesia period 2005.07-2016.07. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(3 Special Issue), 513–522.
- Sugiatiningsih, S., & Hanim, W. (2019b). Analysis of Development of Indonesian Oil and Gas Export and Import in International Markets and Current Transactions Indonesia Period 2008.1-2018.3. *Journal of Advanced Research in Dynamical & Control Systems*, 11(Special Issue), 933–940.
- Sugiatiningsih, & Saudi, N. S. M. (2019). Analysis of economic structural change Indonesia after the reformation ERA. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(3 Special Issue), 1206–1210.
- Sugiatiningsih, Subing, H. J. T., & Mulyati, Y. (2019). Analysis of development of high school, vocational school, and total unemployment in Indonesia and its solutions in response to industrial revolution 4.0. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(7), 40–57.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmawati, F., & Hanim, W. (2020). Analysis of Public Services towards Community's Satisfaction in Department of Population and Civil Registration of Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(02), 3027–3030. <https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i2/pr200604>
- Yandri, P. (2020). Penggunaan Analisis Jaringan Sosial Untuk Mengidentifikasi Pengaruh Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Pasar Tradisional Di Kota Tangerang Selatan, Indonesia. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.30595/jssh.v4i1.3342>
- Yudawisastra, H. G., Sumantri, M., & Manurung, D. T. H. (2018). Dividend Policy , Funding Decision and Share Price : Study in Kompas 100 Index in Indonesia. *International Research Journal of Finance and Economics*, January(165), 46–54. <http://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com>
- Zulkarnaen, W., Erfiansyah, E., Amin, N. N., & Leonandri, D. G. (2020). Comparative Study of Tax Policy Related to COVID-19 in ASEAN Countries. *Test Engineering and Management Journal*, 10(June), 6519–6528.
<https://www.researchgate.net/publication/341495765>
- Zulkarnaen, W., Sasangka, I., Sukirman, D., Yuniati, & Rahadian, F. (2020). Harmonization of sharia rules in effort copyright protection in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2612–2616. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I2/S20201311>

Zunaedi, B. N. F., Annisa, H. R., & Dewi, M. (2022). Fungsi Internal Audit Dan Manajemen Risiko Perusahaan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 24(1), 59–70. <https://doi.org/10.34208/jba.v24i1.1159>